

# Laporan National Kawula Survey Q2 2024

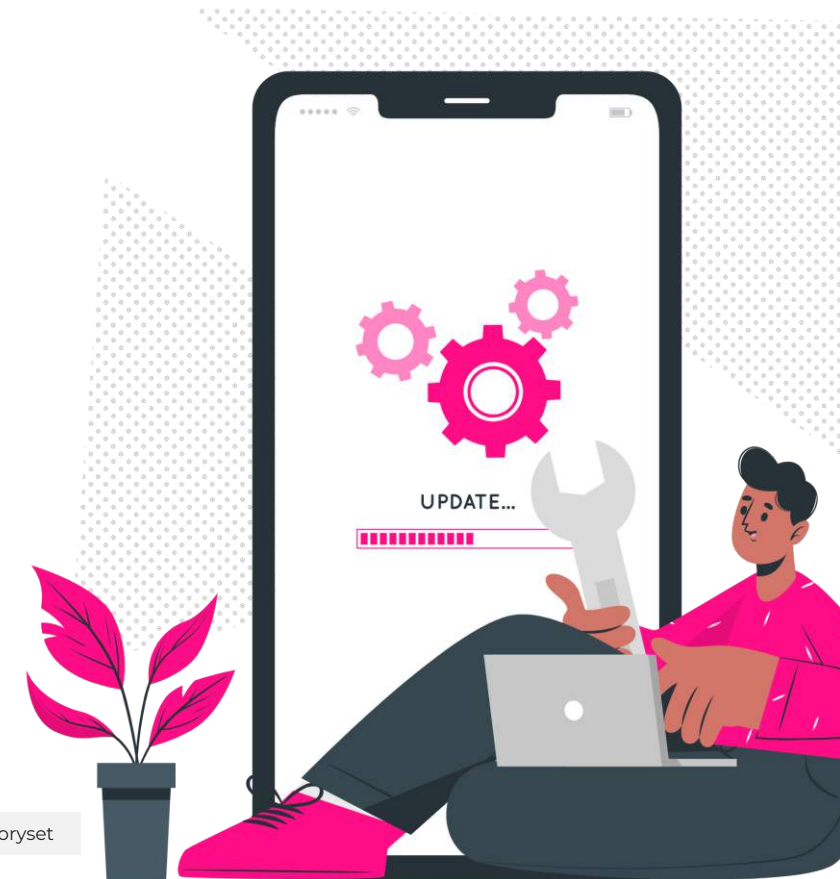


## Penilaian Kinerja Pemerintah



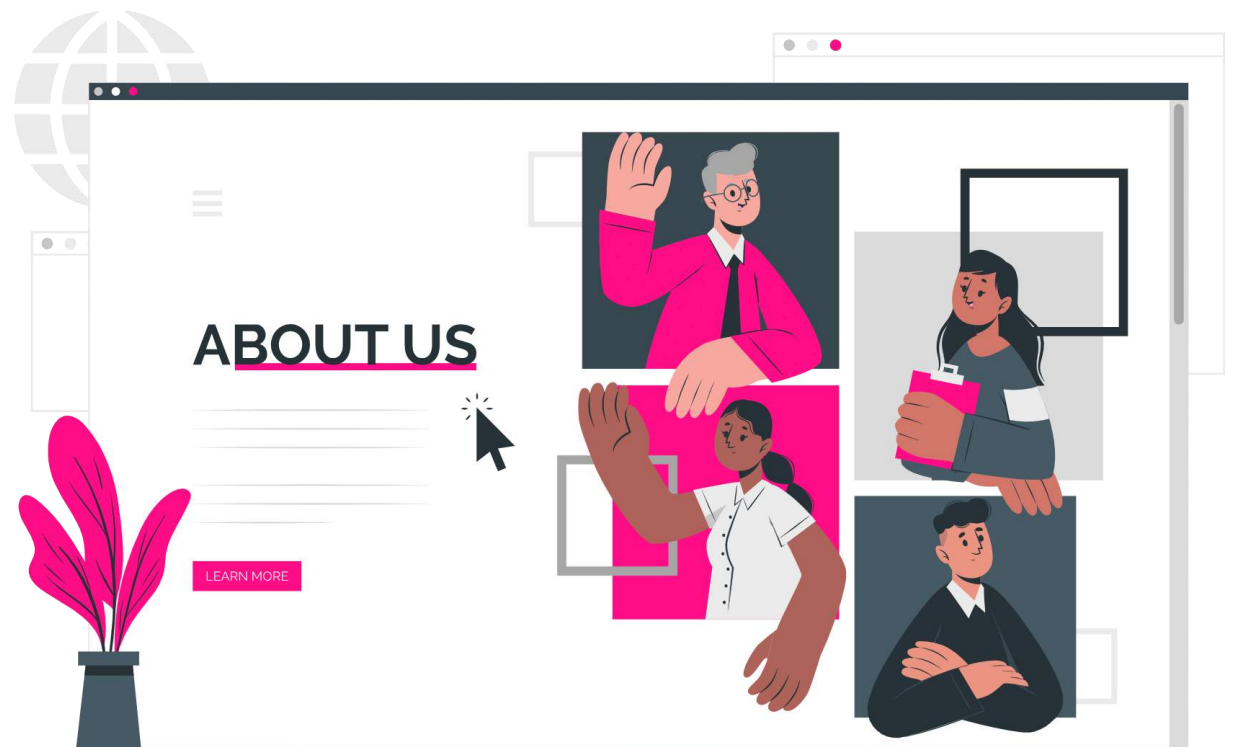
# Daftar Isi

<u>Perkenalan</u> .....	3
<u>Metodologi</u> .....	5
<u>Temuan</u> .....	8
<u>Partisipasi Masyarakat di Pilkada</u> .....	11
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah</u> .....	14
<u>Ekspektasi Pemerintahan Prabowo Subianto</u> .....	19
<u>Topik Prioritas</u> .....	25
<u>Prinsip <i>Good Governance</i></u> .....	31
<u>Tingkat Aktivisme</u> .....	35
<u>Lampiran</u> .....	40





# Perkenalan



# Tentang Survei Nasional Kawula17

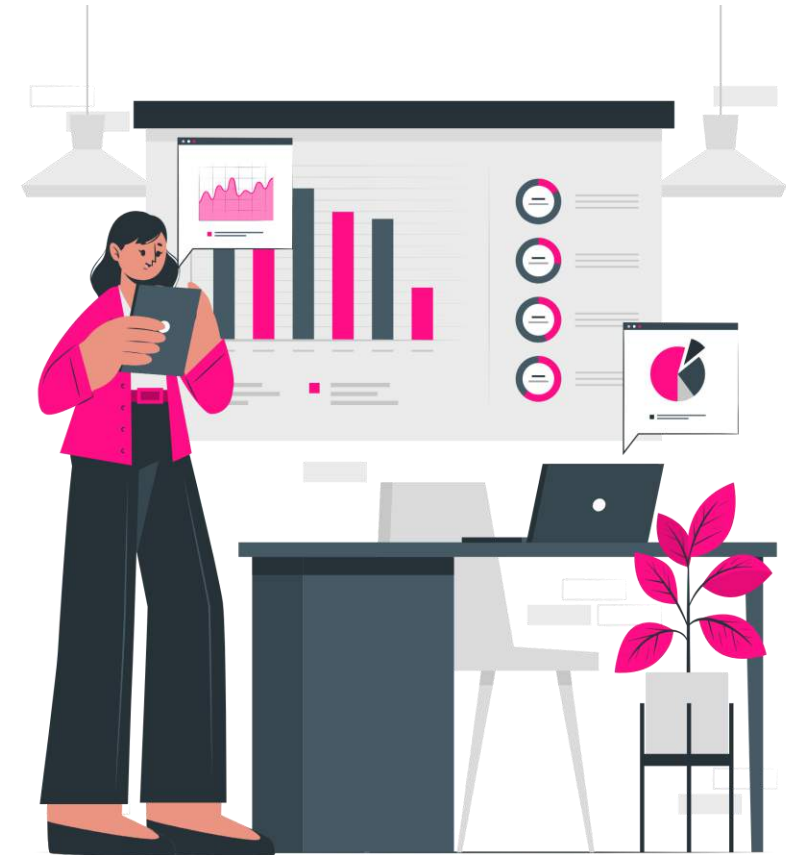
Kawula<sup>17</sup>



## Apa itu National Kawula Survey?

National Kawula Survey merupakan salah satu program utama Yayasan Pelopor Pilihan17. Survei nasional ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. Dalam survei nasional ini, Kawula17 mempublikasikan laporan yang berisi:

1. Antusiasme masyarakat dalam Pilkada November 2024
2. Pantauan kinerja pemerintah
3. Isu/ topik yang dianggap penting oleh masyarakat
4. Ekspektasi/ harapan terhadap pemerintahan selanjutnya
5. Tingkat aktivisme masyarakat



Sumber: Storyset



# Metodologi



Sumber: Storyset



## Tujuan Penelitian

Mengetahui keinginan partisipasi masyarakat, kinerja pemerintah saat ini, ekspektasi/harapan pemerintahan yang akan datang dan topik yang dianggap penting untuk diselesaikan oleh pemerintah.



## Periode Pengambilan Data

12 Juli 2024 – 21 Juli 2024



## Metodologi

*Computer-Assisted Self Interviewing (CASI)* atau survei daring



## Sampling

n = 408 responden\*  
Umur: 17 – 44 tahun  
Area: Indonesia

*\*representatif untuk Indonesia*

# Profil Responden\*

base: all, n = 408



## Jenis kelamin

Laki-laki	51%
Perempuan	49%

## Umur

16-24 tahun	30%
25-34 tahun	36%
35-44 tahun	34%

## Pendidikan

SMP, SMA/ sederajat	85%
Perguruan Tinggi	15%

## Wilayah

Jawa	54%
Sumatera	19%
Sulawesi	10%
Kalimantan	9%
Nusa Tenggara	6%
Papua/ Maluku	2%

## Area

Perkotaan	57%
Pedesaan	43%



Temuan





## Partisipasi masyarakat

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui penyelenggaraan Pilkada 2024 (90%), dan memiliki intensi untuk memilih yang sangat tinggi (90%). Meskipun Pilkada baru akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, sebanyak 2 dari 5 pemilih telah menentukan pilihannya untuk Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran politik di kalangan masyarakat sangat tinggi, bahkan sebelum kampanye resmi dimulai.



## Kinerja Pemerintah

Meskipun mayoritas masyarakat (51%) menganggap kondisi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan 5 tahun yang lalu, pemerintah hanya mendapatkan skor rata-rata 5,7 dari masyarakat atas kinerjanya. Hal ini terkait dengan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

Menariknya, masyarakat yang berada di perkotaan lebih banyak yang merasa kondisi saat ini lebih baik (57%) dari 5 tahun sebelumnya, dibandingkan dengan masyarakat di desa (44%). Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di area perkotaan dengan pedesaan terkait perubahan yang terjadi 5 tahun ke belakang.



## Prinsip *good governance*

Mayoritas masyarakat mengharapkan pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Responsivitas (69%) dan akuntabilitas (74%) dianggap sangat penting oleh publik, begitu juga dengan prinsip keterlibatan publik (66%) dan transparansi (65%) yang dianggap krusial untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.



## Harapan terhadap pemerintahan Prabowo

Lebih banyak masyarakat yang menginginkan (26%) Prabowo melanjutkan program Jokowi dibandingkan yang tidak. Dari program Prabowo, makan siang gratis yang paling dikenal (71%). Seperempat masyarakat skeptis terhadap pemenuhan janji kampanye Prabowo, terutama karena kekhawatiran penyalahgunaan dana (46%).

Selain kekhawatiran penyalahgunaan dana dan sumber daya, masyarakat juga mengkhawatirkan konflik kepentingan partai (44%) dan APBN yang tidak mencukupi untuk membiayai program pemerintahan Prabowo (36%).

# Temuan



## Topik prioritas

Pendidikan tetap menjadi perhatian utama, dengan 40% masyarakat menganggapnya sebagai isu paling penting. Selain pendidikan, isu korupsi (29%), ekonomi (29%), kemiskinan (26%), dan pekerjaan (26%) juga disorot oleh masyarakat sebagai isu prioritas. Sayangnya, pemerintah dinilai menampilkan performa yang buruk dalam isu-isu prioritas tersebut. Bahkan masyarakat menilai pemerintah bekerja sangat buruk pada isu korupsi (78%), kemiskinan (65%), dan pekerjaan (49%).

Permasalahan-permasalahan lingkungan juga disorot oleh masyarakat. Di bidang lingkungan, polusi udara menempati posisi sebagai isu paling penting (36%). Isu lingkungan lain yang dianggap penting adalah pengelolaan sampah plastik (32%), banjir (30%), limbah industri (28%), dan pemanasan global (28%). Penilaian yang diberikan oleh masyarakat pada performa pemerintah pada isu-isu lingkungan di atas juga buruk.

Performa pemerintah juga dinilai buruk dalam menangani masalah-masalah yang terjadi belakangan ini. Masyarakat menganggap pemerintah perlu segera menyelesaikan kenaikan harga bahan pokok (32%), kualitas pendidikan yang tidak merata (31%), judi *online* (29%), kekerasan seksual (21%), dan politik dinasti (21%). Performa pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah ini masih dianggap buruk oleh masyarakat.



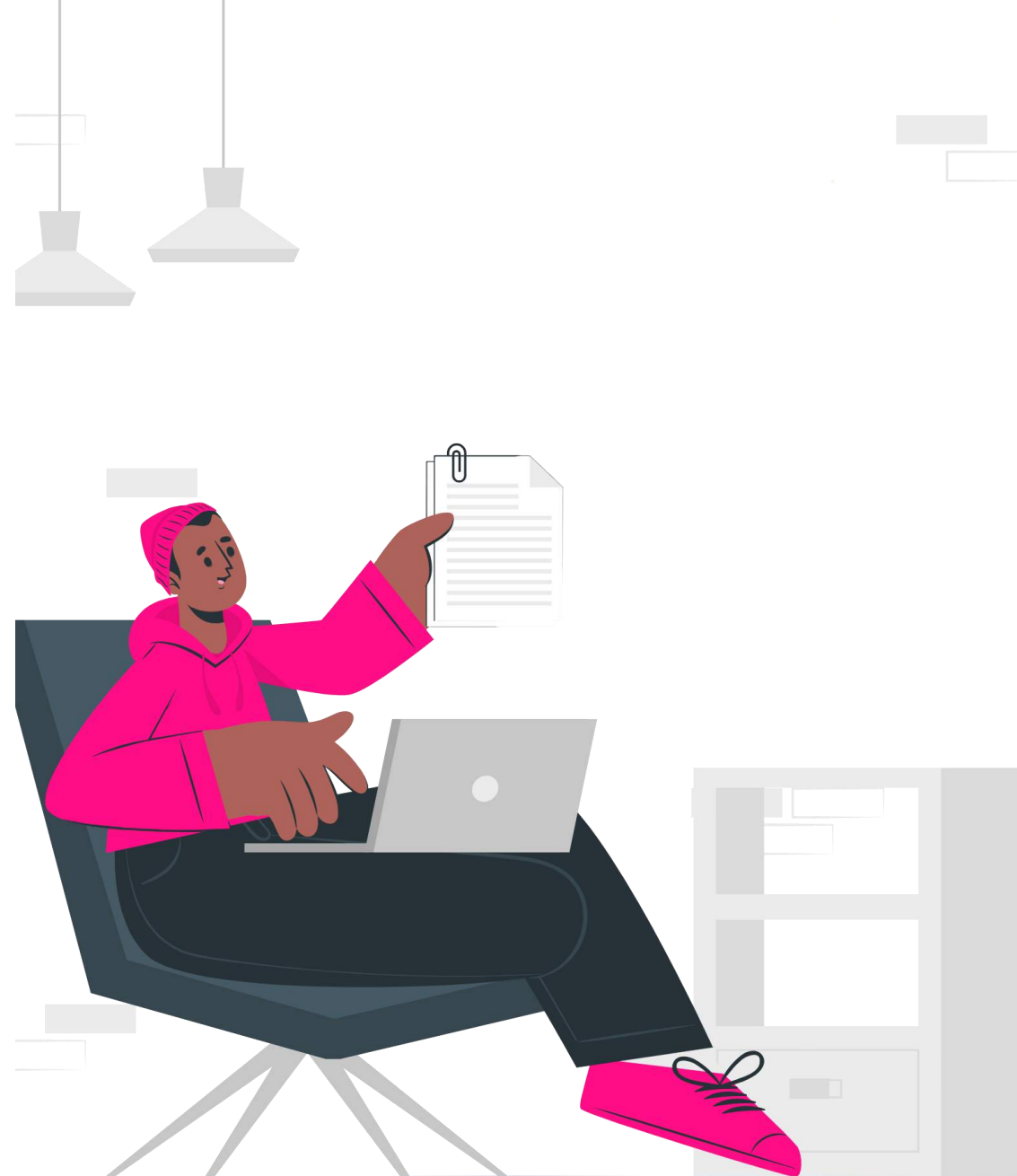
## Tingkat aktivisme

Tingkat aktivisme politik sering kali ditemukan rendah di berbagai negara di dunia. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat berada di tingkat aktivisme politik yang rendah (62%). Artinya, masyarakat Indonesia mungkin menonton berita politik, membaca artikel, atau mendiskusikan isu politik secara informal, tetapi jarang terlibat langsung dalam aktivitas politik. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berada di tingkat aktivisme tinggi (15%).



1.

# Partisipasi Masyarakat di Pilkada



# Mayoritas masyarakat mengetahui akan ada Pilkada di November 2024

Kawula<sup>17</sup>

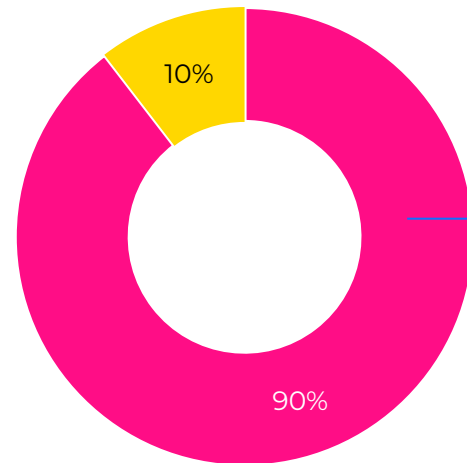


Tahun 2024 merupakan tahun yang penting untuk demokrasi Indonesia. Setelah Pemilihan Presiden dan legislatif pada bulan Februari lalu, pada November yang akan datang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diadakan untuk memilih **Gubernur, Walikota dan Bupati**.

9 dari 10 masyarakat mengetahui akan diselenggarakannya Pilkada yang berarti tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi.

## Apa anda tahu akan ada Pilkada?

base: semua, n= 408



■ Tahu ■ Tidak tahu

**Laki-laki** cenderung lebih mengetahui akan ada Pilkada (**93%**), dibandingkan Perempuan (86%)

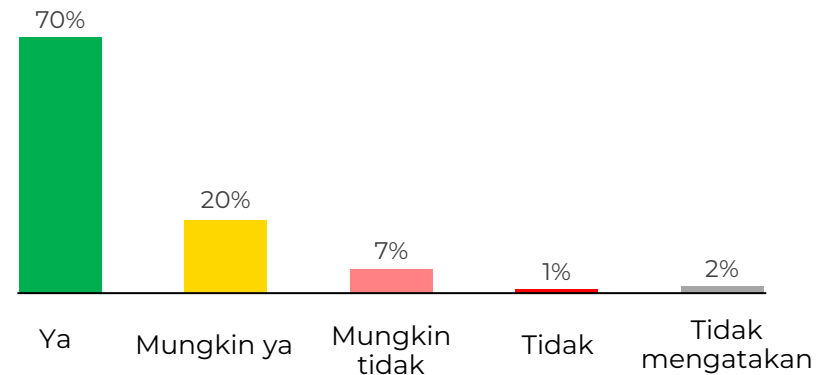
# Masyarakat antusias mengikuti Pilkada 2024

Kesadaran akan Pilkada yang tinggi juga dibarengi dengan antusiasme untuk berpartisipasi yang tinggi pula. 9 dari 10 masyarakat berencana untuk ikut berpartisipasi.

Imbas dari beberapa nama kandidat sudah mulai diperbincangkan di media, mungkin menjadi salah satu penyebab hampir separuh masyarakat sudah mulai menjatuhkan pilihannya.

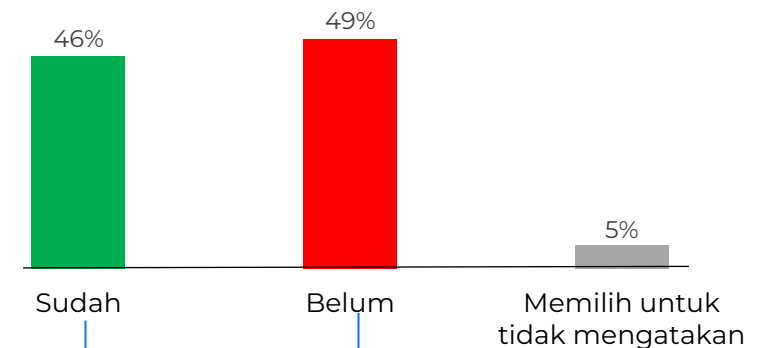
## Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam Pilkada?

base: semua, n= 408



## Apakah kamu sudah menentukan pilihan dalam Pilkada?

base: semua, n= 408



Masyarakat perkotaan (55%), masyarakat perdesaan (33%)

Masyarakat perdesaan (61%), sementara masyarakat perkotaan (41%)

2.

## Penilaian Kinerja Pemerintah

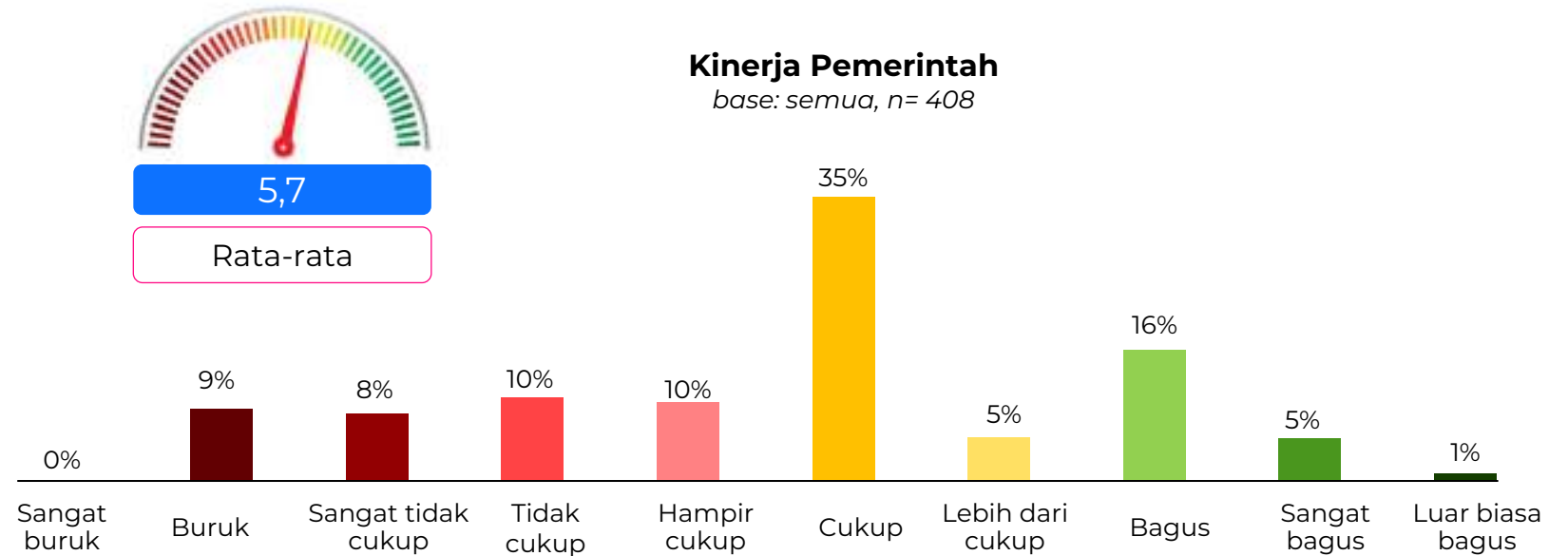


Sumber: Storyset

# Pemerintah menerima rata-rata skor 5,7 atas kinerjanya

Rata-rata, nilai yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas kinerjanya adalah 5,7 dari 10.

Masyarakat berusia muda yaitu 16-24 tahun paling rendah (5,2) dalam menilai kinerja Jokowi jika dibandingkan mereka yang berusia 35-44 yang rata-rata memberikan nilai 6,1.



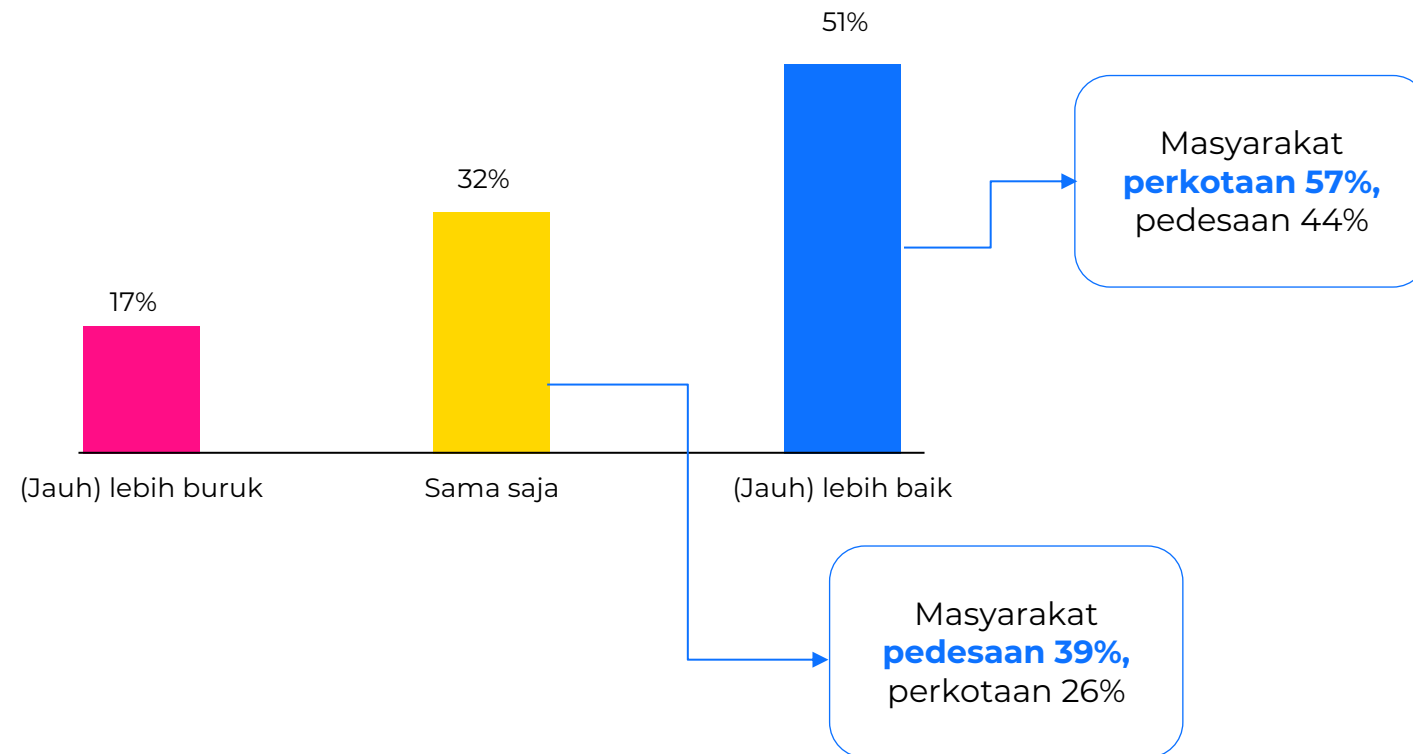
# 1 dari 2 masyarakat menilai kondisi saat ini lebih baik

Sepuluh masyarakat menilai kondisi Indonesia saat ini sudah (jauh) lebih baik jika dibandingkan 5 (lima) tahun lalu. Namun, masih terdapat banyak ruang bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik.

Khususnya masyarakat yang berada di kota merasa keadaan menjadi (jauh) lebih baik (57%). Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan warga pedesaan yang merasa keadaan lima tahun terakhir merupakan peningkatan (44%).

## Perubahan Indonesia 5 Tahun Terakhir

base: semua, n= 408

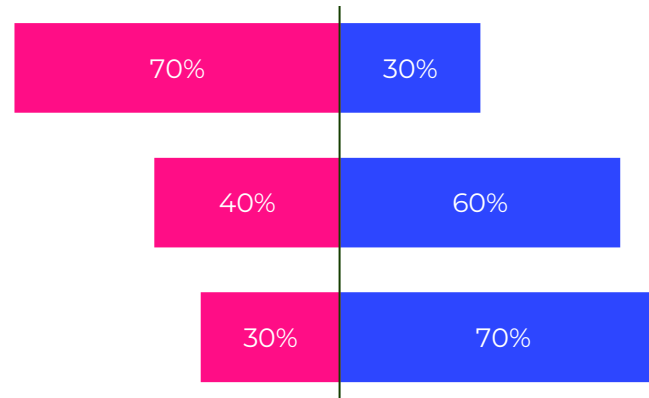


# Cara membaca net score

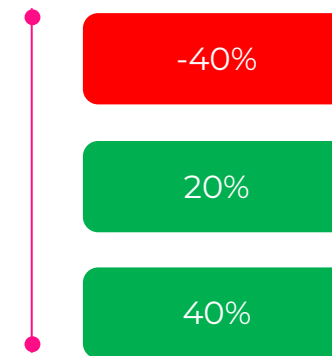
**Net score** adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai perbedaan opini positif dan negatif. Net score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Net score diperoleh dengan **jumlah respon positif (misalnya sangat puas) dikurangi negatif (misalnya sangat tidak puas).**

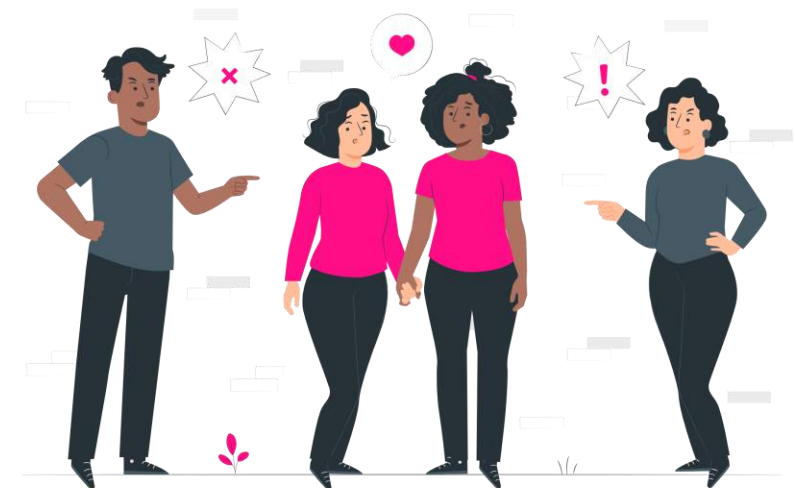
## Contoh:



## NET Score



■ (Sangat) tidak puas ■ (Sangat) puas



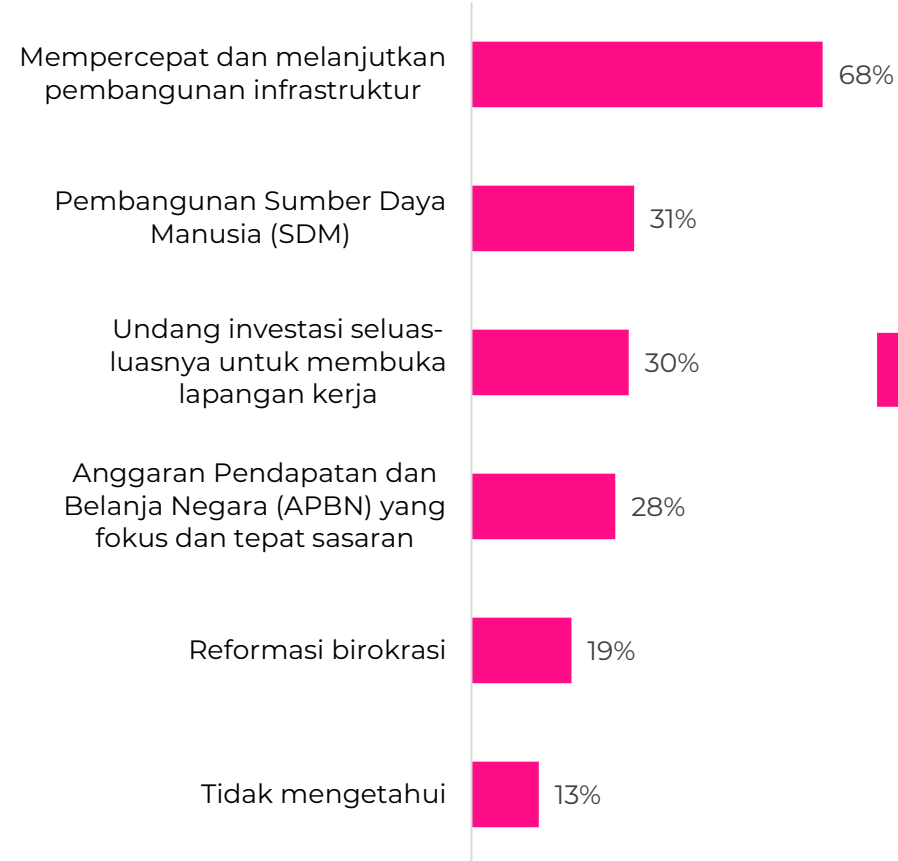
# Mayoritas masyarakat mengetahui dan puas dengan pembangunan infrastruktur di era Jokowi

Program Jokowi 2019–2024 yang paling diketahui oleh masyarakat dan menonjol adalah pembangunan infrastruktur (68%), sumber daya manusia (31% dan membuka investasi (30%)

Kinerja Jokowi dinilai cukup bagus pada pembangunan infrastruktur, mengelola APBN, dan reformasi birokrasi namun tidak dengan pembangunan SDM dan investasi.

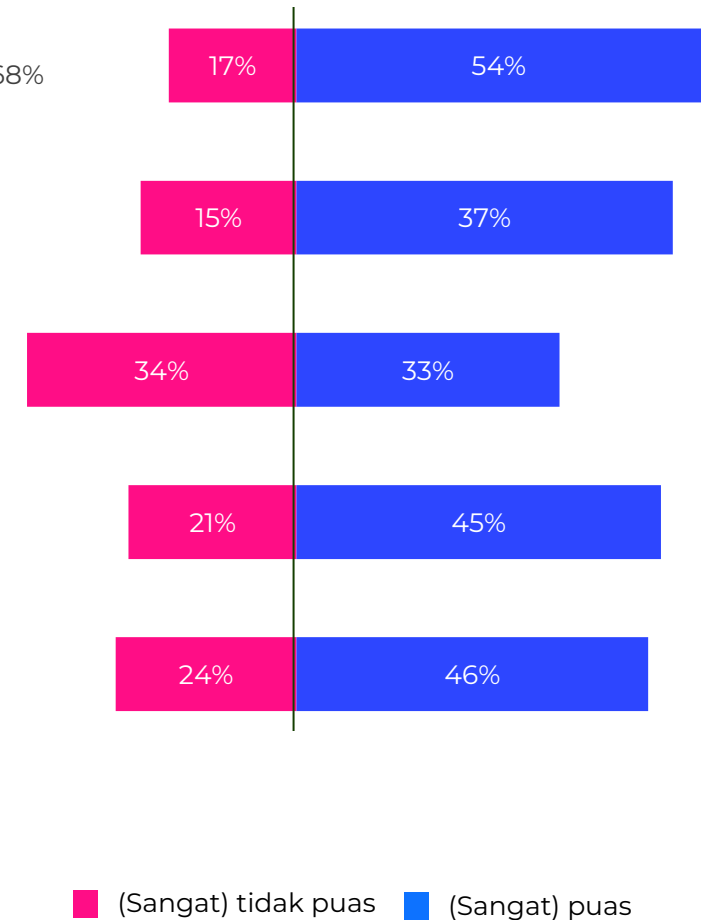
## Kesadaran Terhadap Prioritas Jokowi

base: semua, n= 408



## Kinerja Program Prioritas Jokowi

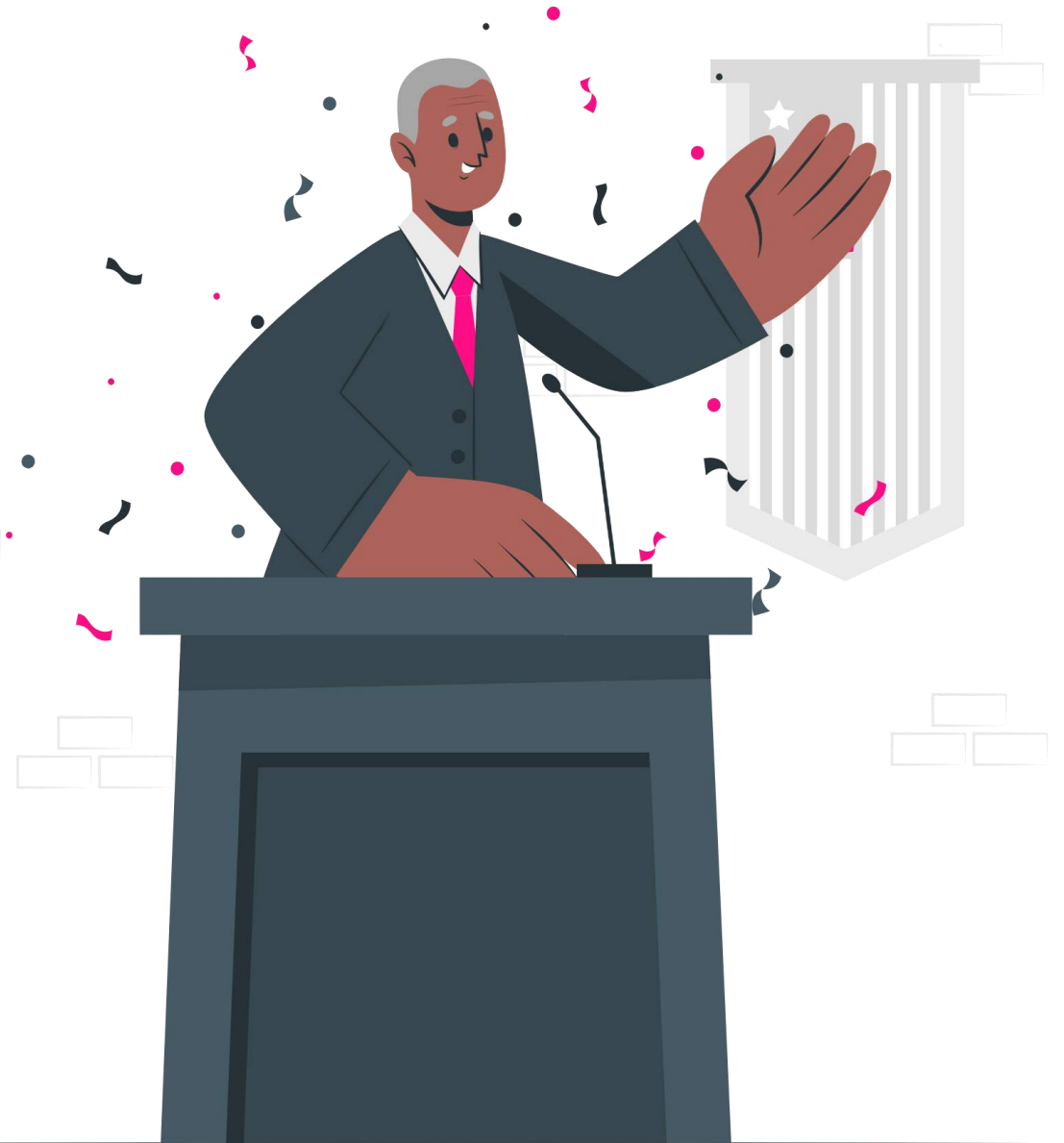
base: tahu isu prioritas, n=varies



■ (Sangat) tidak puas ■ (Sangat) puas

3.

## Ekspektasi Pemerintahan Prabowo Subianto



# Program Jokowi dinilai penting untuk dilanjutkan oleh Prabowo

Kawula<sup>17</sup>



Hampir separuh masyarakat menilai bahwa (sangat) penting (46%) bagi Prabowo untuk melanjutkan program pemerintah sebelumnya. Hanya 20% yang merasa tidak perlu.

Hal ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kontinuitas kebijakan pemerintahan yang mungkin telah membawa manfaat/ perubahan positif.

## Kepentingan Melanjutkan Program Jokowi

base: semua, n = 408



## NET Score

26%



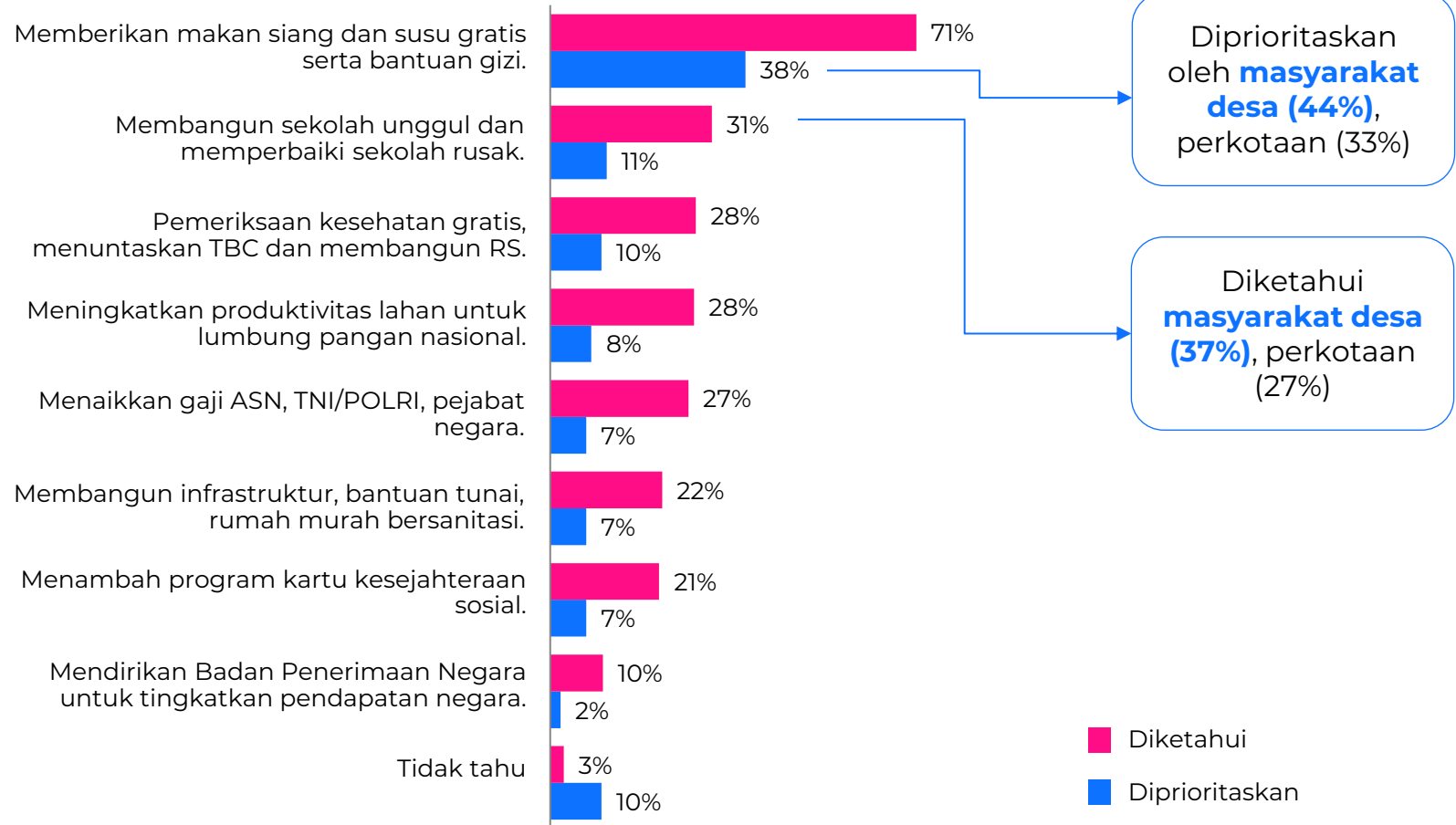
# Makan siang gratis menjadi program Prabowo yang paling populer

Makan siang gratis (71%), membangun sekolah unggul (31%) dan pemeriksaan kesehatan (28%) menjadi 3 program yang paling diketahui oleh masyarakat.

Program makan siang gratis menjadi program yang paling diketahui (71%) dibandingkan program lainnya. Namun hanya 38% yang menilai program ini perlu diprioritaskan terutama bagi mereka yang tinggal di desa.

## Janji Pemerintahan Prabowo-Gibran

base: semua, n = 408



Diprioritaskan oleh **masyarakat desa (44%)**, perkotaan (33%)

Diketahui **masyarakat desa (37%)**, perkotaan (27%)

■ Diketahui  
■ Diprioritaskan

# Opini masyarakat terbagi terkait kinerja Prabowo di masa depan

Kawula<sup>17</sup>



Keyakinan masyarakat terbagi ketika menilai potensi keberhasilan program Prabowo 5 tahun yang akan datang.

38% masyarakat merasa (sangat) yakin terhadap kemampuan Prabowo. Namun 36% merasa masih ragu mencerminkan sikap yang lebih hati-hati

26% sisanya yang tidak yakin menunjukkan skeptisme mengenai janji-janji Prabowo akan dipenuhi.

## Optimisme Terhadap Janji Prabowo

base: semua, n = 408



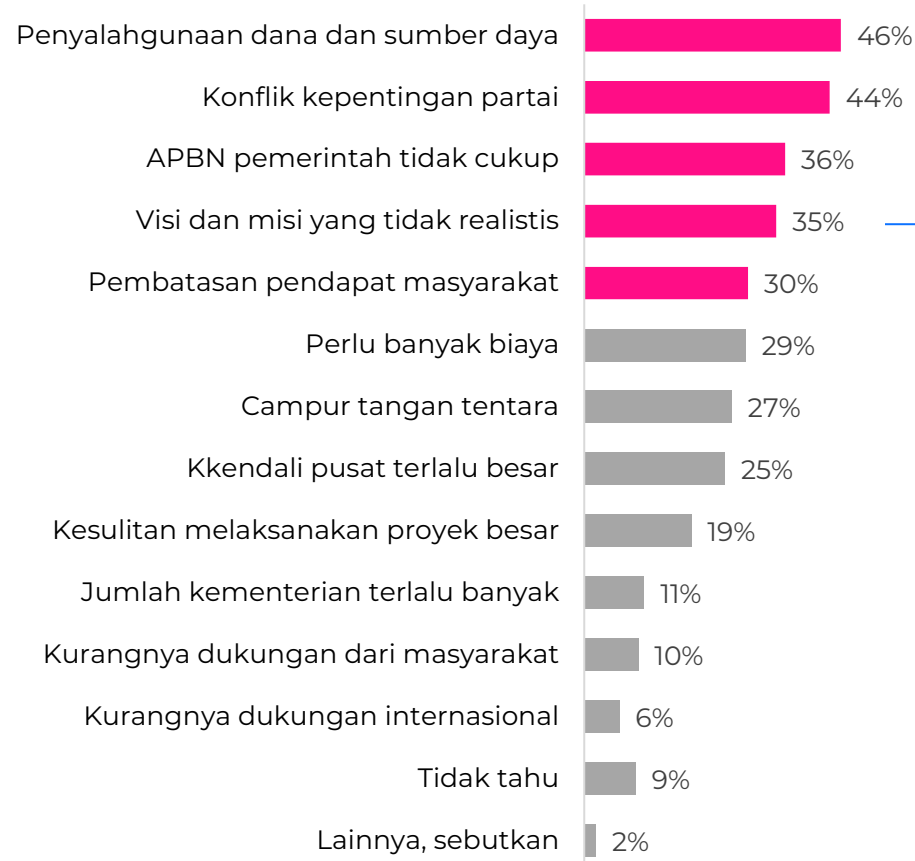
# Masyarakat khawatir adanya penyalahgunaan dana dan sumber daya dapat menghambat kinerja Prabowo

Kawula<sup>17</sup>



## Faktor Prabowo Tidak Dapat Memenuhi Janji

base: tidak yakin terhadap janji Prabowo, n= 105



Masyarakat perkotaan 46%, pedesaan 18%

Bagi mereka yang merasa tidak yakin bahwa Prabowo dapat memenuhi janji-janjinya, disebabkan karena dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan dana (46%), konflik kepentingan partai (44%) dan APBN tidak cukup untuk membiayai program (36%).

## 2 dari 5 masyarakat menilai hubungan Prabowo dengan dunia internasional membantu keberhasilan program

Kawula<sup>17</sup>



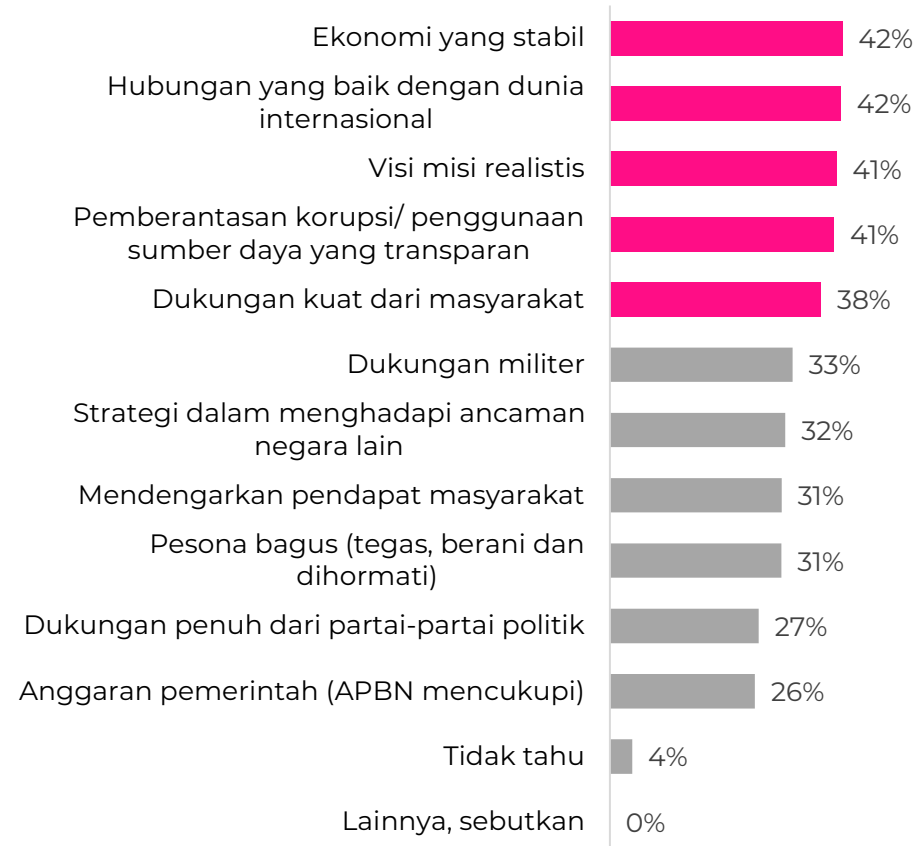
Bagi mereka yang percaya bahwa Prabowo dapat menunaikan janjinya, keyakinan ini didasari oleh ekonomi yang stabil (42%), hubungan yang baik dengan dunia internasional (42%), serta visi misi yang realistis (41%).

Alasan ekonomi stabil lebih banyak dipilih masyarakat desa ketimbang masyarakat di perkotaan.

Di sisi lain, alasan hubungan yang baik dengan dunia internasional lebih banyak dipilih oleh orang yang berpendidikan perguruan tinggi.

### Faktor Prabowo Dapat Memenuhi Janji

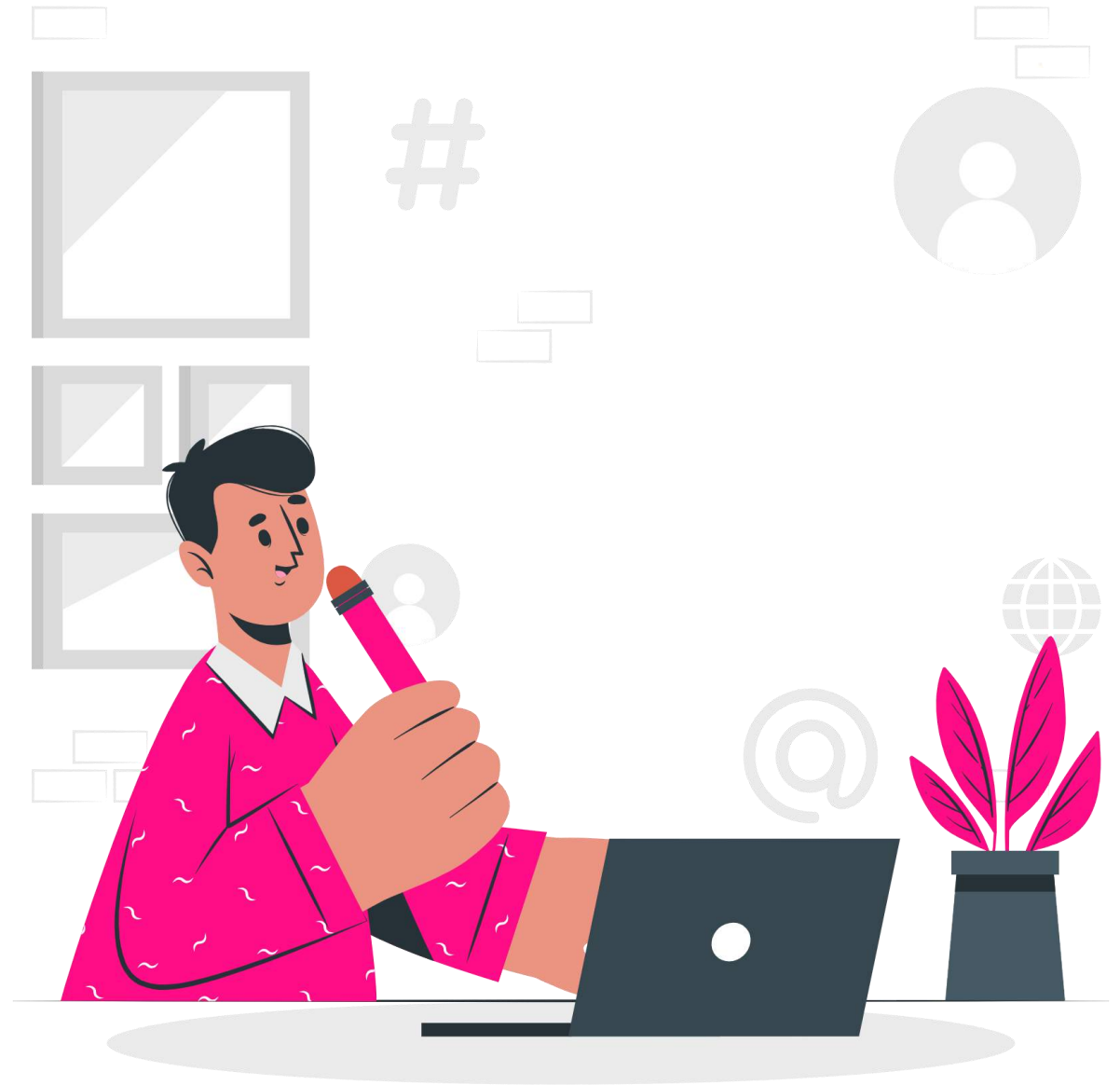
base: yakin terhadap janji Prabowo, n= 156



Masyarakat pedesaan 51%, perkotaan 34%

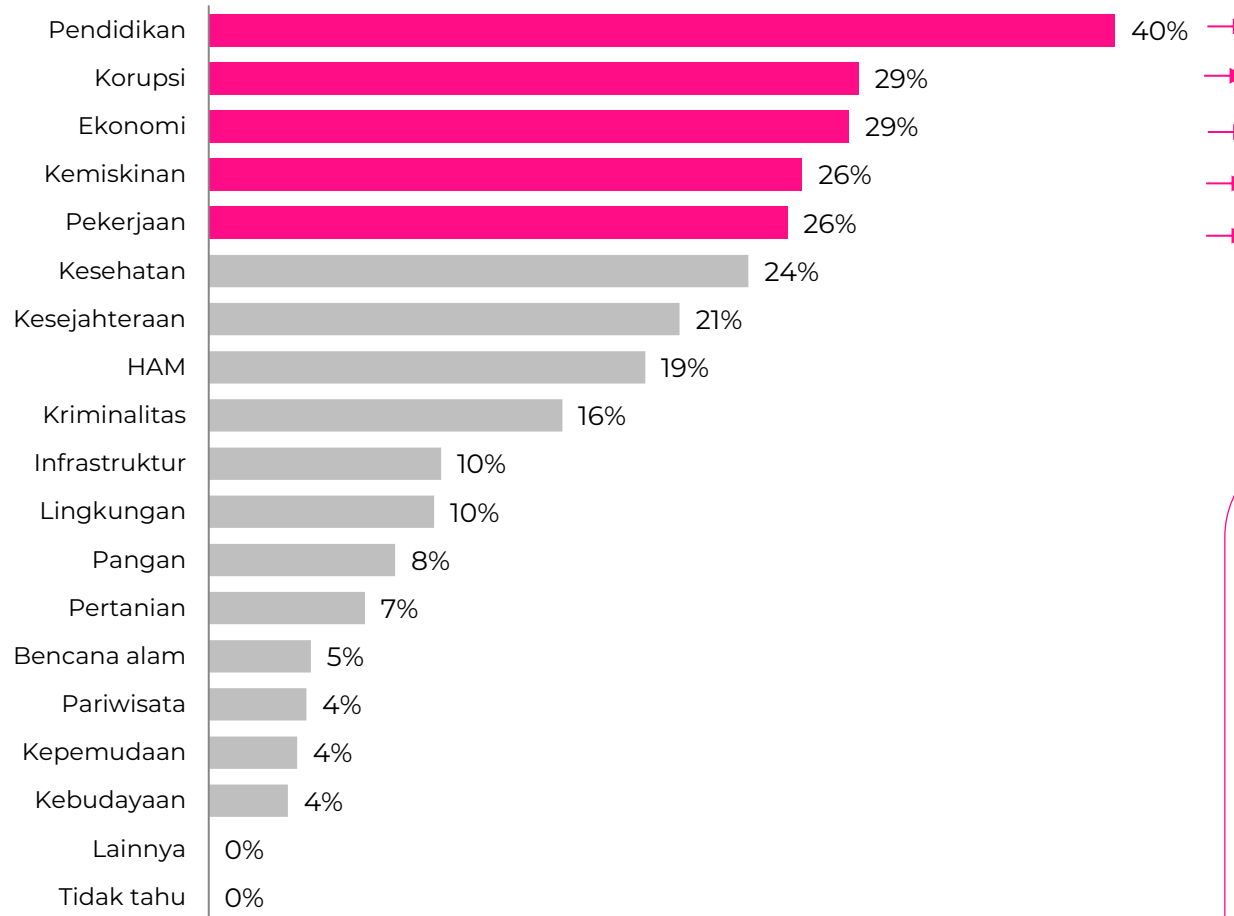
Tingkat pendidikan perguruan tinggi 64%, non perguruan tinggi 38%

## 4. Topik Prioritas

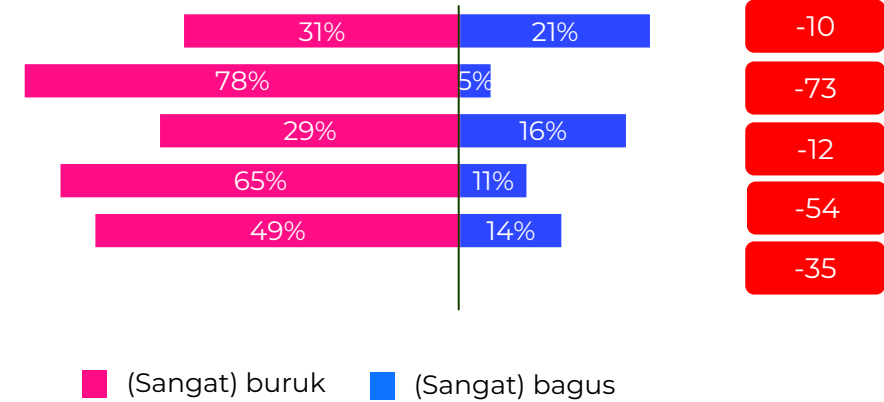


# Pendidikan, ekonomi, dan korupsi menjadi 3 isu terpenting oleh masyarakat

**Topik Prioritas**  
base: semua, n = 408



**Penilaian Kinerja Pemerintah (Isu Prioritas)**  
base: tahu isu prioritas, n=varies



Isu pendidikan (40%) menjadi topik yang paling dianggap penting oleh masyarakat. Selain itu, isu korupsi (29%), ekonomi (29%), kemiskinan (26%), dan pekerjaan (26%) menjadi 5 isu teratas yang dianggap penting.

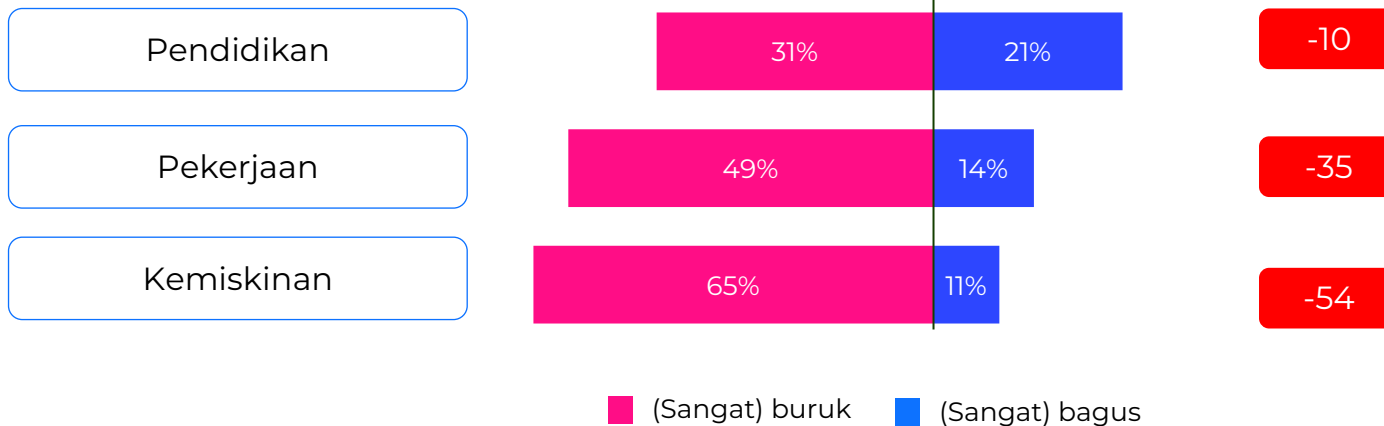
4 dari 5 masyarakat menilai pemerintah bekerja (sangat) buruk dalam menangani masalah korupsi. Hal ini mengindikasikan ketidakpuasan yang besar dari masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Masyarakat juga menilai pemerintah masih gagal menyelesaikan isu kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan.

# Kinerja pemerintah per topik

## Penilaian Kinerja Pemerintah (Topik)

base: memilih memilih isu prioritas, n=beragam

### NET Score



Orang yang berpendidikan **perguruan tinggi lebih banyak menilai cukup (67%)** pada isu pendidikan, ketimbang non perguruan tinggi (44%).

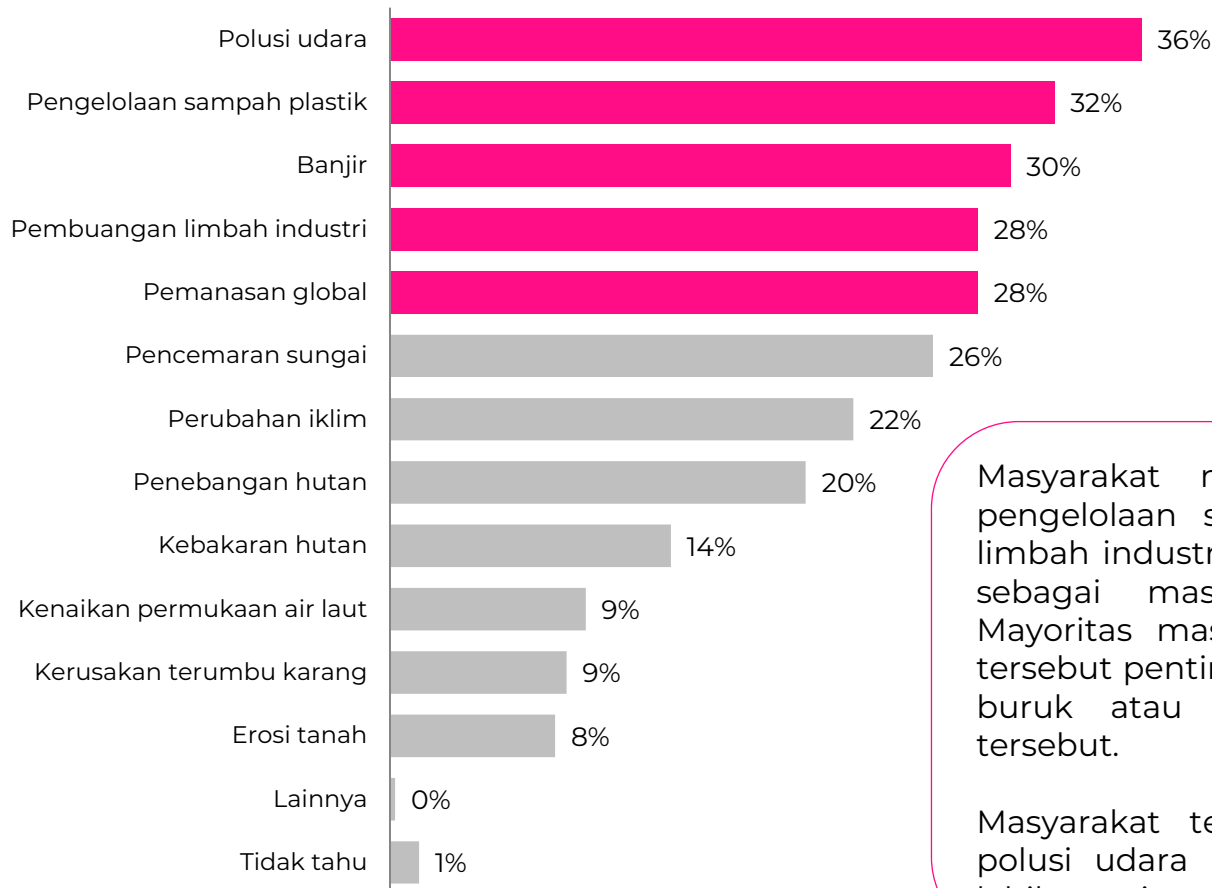
Masyarakat berusia **16-24 lebih banyak menilai sangat buruk (70%)** pada isu pekerjaan, ketimbang usia 25-44 (42%).

Ketika berbicara tentang kemiskinan, orang di **pedesaan lebih banyak menilai sangat buruk (76%)**, ketimbang di kota (56%).

# Polusi, sampah, dan banjir menjadi 3 isu lingkungan paling penting

## Topik Lingkungan yang Dianggap Penting

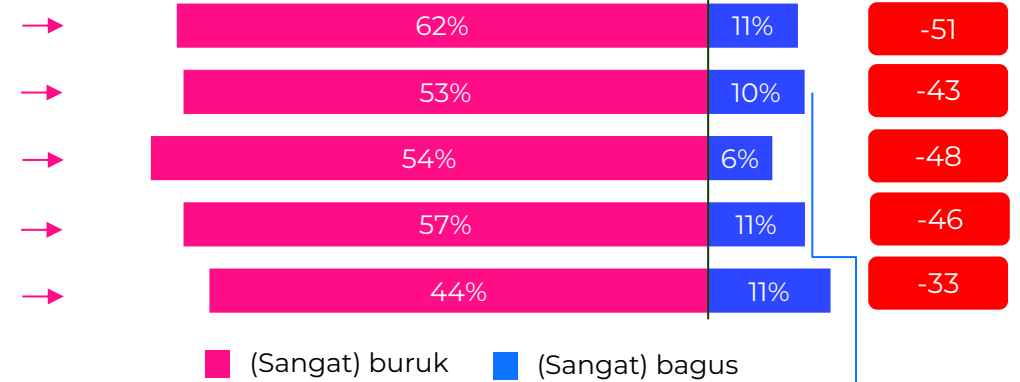
base: semua, n = 408



## Penilaian Kinerja Pemerintah (Isu Lingkungan)

base: memilih isu lingkungan, n=varies

## NET Score



Masyarakat menganggap polusi udara (36%), pengelolaan sampah plastik (32%), banjir (30%), limbah industri (28%), dan pemanasan global (28%) sebagai masalah lingkungan yang penting. Mayoritas masyarakat yang menganggap isu-isu tersebut penting menilai kinerja pemerintah sangat buruk atau buruk dalam menangani isu-isu tersebut.

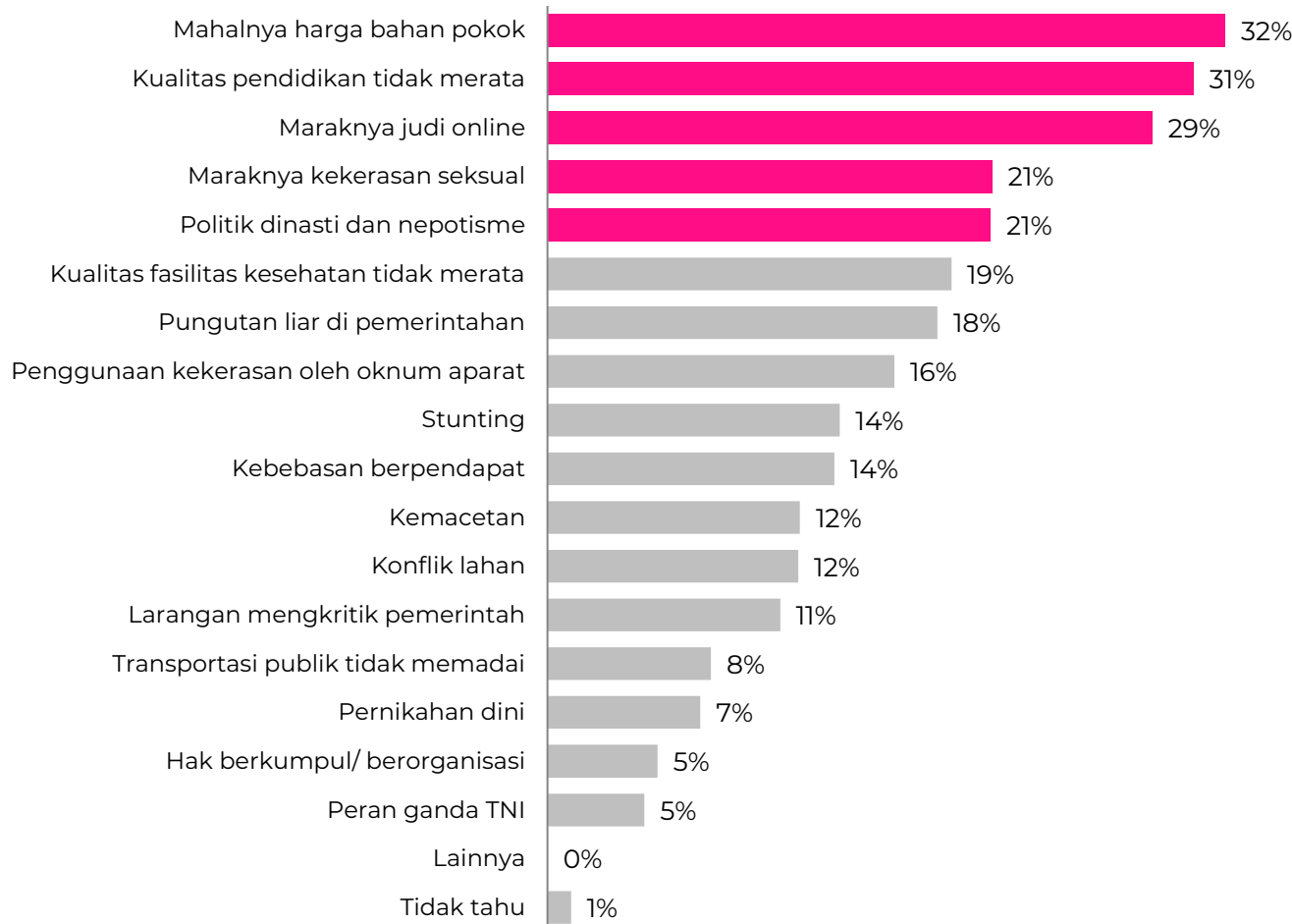
Masyarakat terutama di kota, menilai masalah polusi udara (42%) dan pemanasan global (33%) lebih penting dibandingkan masyarakat di desa.

Ketika berbicara tentang sampah plastik, orang-orang di **kota merasa pemerintah lebih baik menangani masalah ini (17%)** dibandingkan dengan masyarakat di desa (2%).

# Masyarakat mendesak agar harga bahan pokok, pemerataan kualitas pendidikan dan penyelesaian judi online segera diselesaikan

## Permasalahan yang Penting Diselesaikan

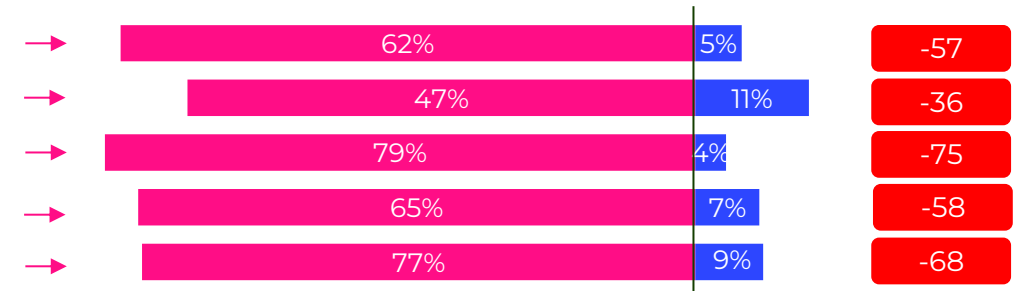
base: semua, n = 408



## Penilaian Kinerja Pemerintah (Permasalahan)

base: memilih permasalahan, n=beragam

NET Score



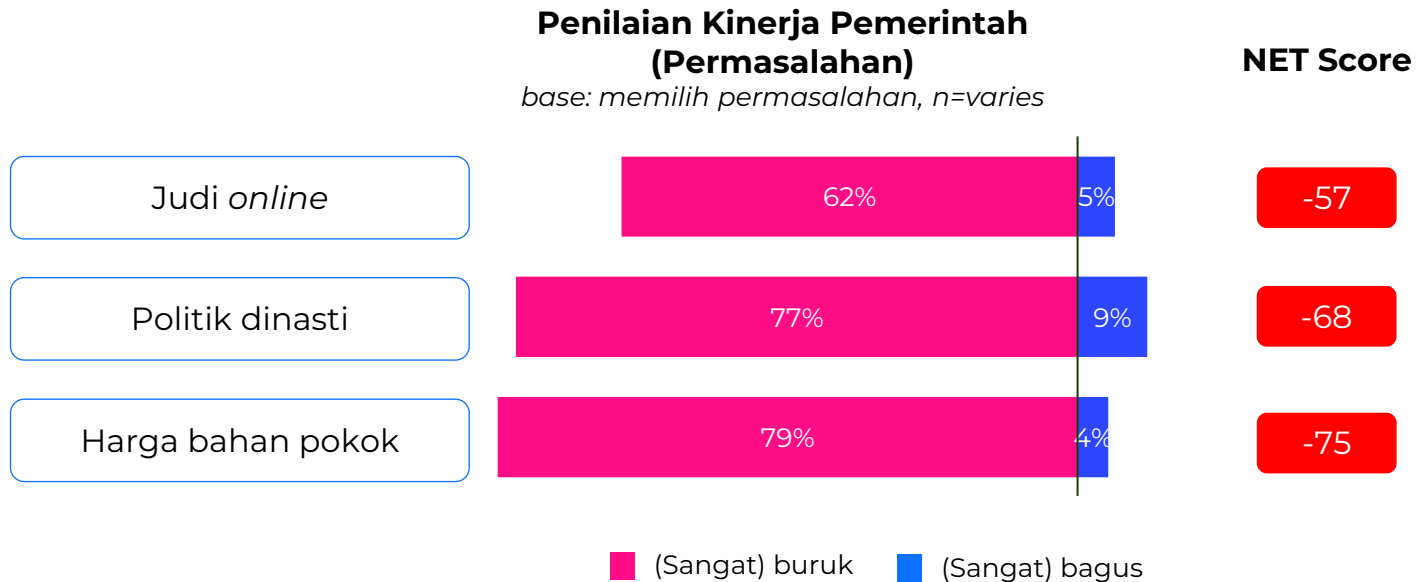
■ (Sangat) buruk ■ (Sangat) bagus

3 dari 10 masyarakat menganggap masalah naiknya harga bahan pokok, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan maraknya judi *online* sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Sedangkan 2 dari 10 masyarakat menganggap masalah kekerasan seksual dan politik dinasti sebagai masalah yang harus segera diselesaikan.

Mayoritas masyarakat menilai kinerja pemerintah pada permasalahan-permasalahan tersebut sangat buruk atau buruk. Hanya sebagian kecil masyarakat kinerja pemerintah sudah bagus dalam menangani hal tersebut.

# Kinerja pemerintah dalam permasalahan umum di Indonesia

Kawula<sup>17</sup>



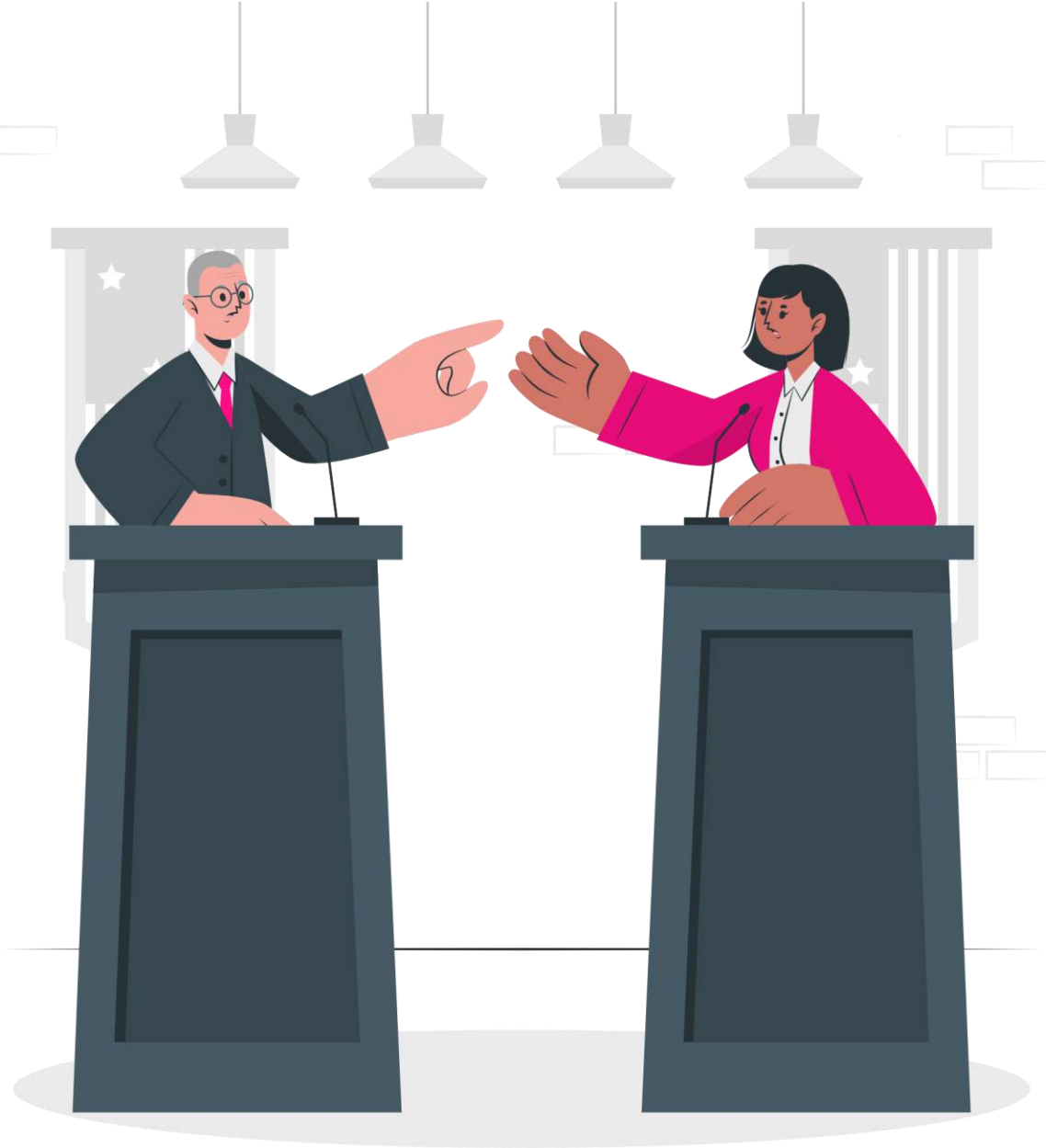
Masyarakat di **Jawa (87%)** menilai pemerintah belum mampu memberantas judi **online**, dibandingkan masyarakat di Sumatera (61%) dan lainnya (63%).

Orang yang menganggap isu politik dinasti penting menilai pemerintah **bekerja sangat buruk (77%)** dalam mengatasi permasalahan politik dinasti.

Masyarakat terutama di **Jawa, menilai pemerintah (sangat) buruk dalam menjaga harga bahan pokok (72%)**, dibandingkan masyarakat di Sumatera (44%) dan lainnya (49%).

5.

# Prinsip *Good Governance*



**Prinsip *good governance*** atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip yang memastikan pemerintah berjalan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan adil.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab dan berintegritas.

69

Masyarakat Indonesia mayoritas setuju agar pemerintah menerapkan prinsip *good governance*. Ini ditunjukkan dengan rata – rata skor prinsip *good governance* adalah 68 dari 100.



# Masyarakat memandang pemerintah harus menerapkan prinsip keterlibatan publik dan responsivitas

7 dari 10 masyarakat mendorong pemerintah untuk tanggap dalam menyelesaikan masalah dan melibatkan publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa menganggap prinsip keterlibatan publik dan responsivitas penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

## Keterlibatan Publik

14%

Merupakan kewenangan pemerintah untuk mendengarkan atau tidak mendengarkan pendapat masyarakat.

20%

Netral.

66%

Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat dan mempertimbangkannya semaksimal mungkin.

## Responsivitas

15%

Pemerintah memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan kapan saja.

16%

Netral.

69%

Pemerintah perlu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanggap.

# Masyarakat memandang pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Mayoritas masyarakat mendukung pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas (74%) dan transparansi (65%).

Masyarakat menganggap pemerintah harus bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakannya. Di sisi lain, masyarakat juga mendorong pemerintah untuk mempublikasikan seluruh informasi terkait proyek pembangunan kepada masyarakat.

## Akuntabilitas

11%

Pemerintah boleh mengabaikan dampak dari keputusannya dan tidak perlu menyelesaikan masalah yang muncul kemudian.

15%

Netral.

74%

Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kebijakannya serta mencari cara untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan.

## Transparansi

11%

Pemerintah tidak perlu mempublikasikan seluruh informasi proyek pembangunan kepada masyarakat.

24%

Netral.

65%

Pemerintah harus mempublikasikan semua informasi terkait proyek pembangunan kepada masyarakat secepat mungkin.

6.

## Tingkat Aktivisme



# Tingkat aktivisme masyarakat Indonesia

## Klasifikasi aktivisme

- 1. Gladiator:** Sangat aktif dalam politik, sering menjadi anggota partai, kandidat, atau aktivis penggerak.
- 2. Aktivis:** Terlibat dalam kampanye, demonstrasi, dan kegiatan mendukung isu atau kandidat.
- 3. Partisipan:** Rutin berpartisipasi dalam aktivitas politik seperti pemilu dan diskusi.
- 4. Spectator:** Mengikuti perkembangan politik secara pasif.
- 5. Apolitik:** Tidak tertarik atau terlibat dalam aktivitas politik.

Secara umum, tingkat aktivisme masyarakat Indonesia masih rendah. Kelompok terbesar adalah spectator (40%), yang mengikuti politik secara pasif dengan menonton berita atau membaca artikel tanpa terlibat langsung. Hanya sedikit yang berada di kelompok aktivis (13%) dan gladiator (2%), yang aktif dalam partai politik, pemilu, atau organisasi politik.

Tingkat aktivisme tinggi



Gladiator

Aktivis

Partisipan

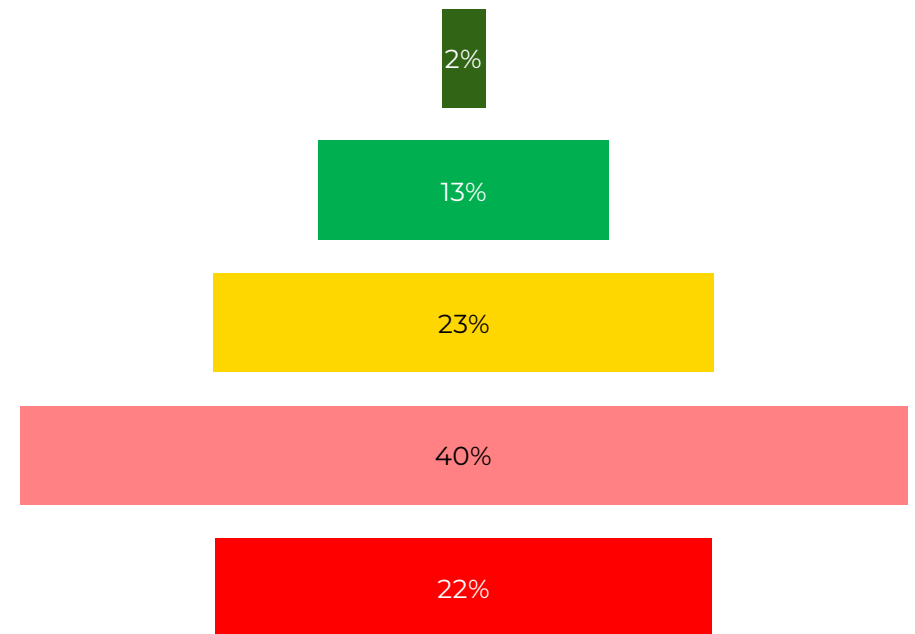
Spectator

Apolitik

Tingkat aktivisme rendah

## Aktivisme Masyarakat Indonesia

base: semua, n = 408



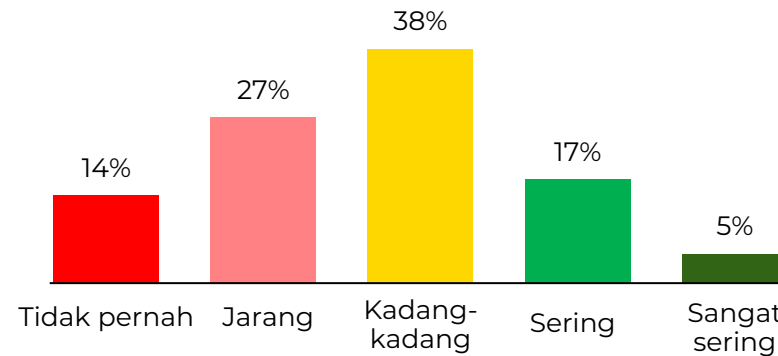
# Tingkat aktivisme (1)

2 dari 5 masyarakat kadang-kadang berdiskusi mengenai politik dengan teman atau keluarganya. Walaupun cukup banyak masyarakat yang berdiskusi tentang politik, mayoritas masyarakat tidak pernah berpartisipasi dalam organisasi sosial atau politik (51%).

Masyarakat yang berusia 35-44 lebih aktif dalam organisasi sosial atau politik (14%) ketimbang kelompok usia 16-24 (3%) dan 25-34 (6%).

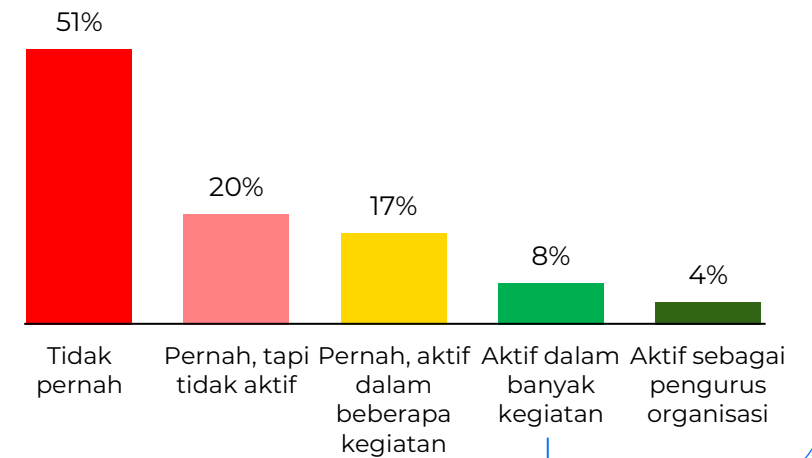
## Frekuensi Berdiskusi tentang Politik

base: semua, n = 408



## Partisipasi dalam Organisasi Sosial atau Politik

base: semua, n = 408



**Mereka yang usia 35-44 lebih aktif (14%),** dibandingkan usia 16-24 (3%) dan usia 25-34 (6%)

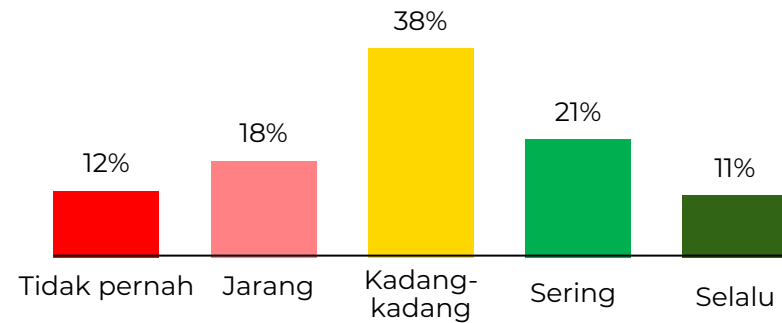
## Tingkat aktivisme (2)

Ketika Pemilu, sebagian masyarakat (38%) kadang-kadang mencari informasi tentang kandidat atau isu. Sebanyak 32% masyarakat sering atau selalu mencari informasi terkait Pemilu.

Di sisi lain, ketika kebijakan pemerintah merugikan masyarakat, sebagian besar masyarakat (43%) hanya berdiskusi dengan kelompoknya. Hanya sebagian kecil yang menghubungi pejabat terkait (9%) dan melakukan aksi protes (15%).

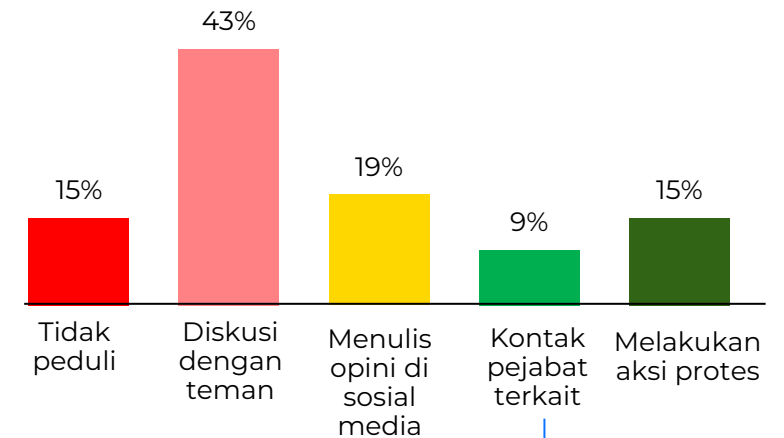
### Frekuensi Mencari Informasi saat Pemilu

base: semua, n = 408



### Reaksi Terhadap Kebijakan yang Merugikan

base: semua, n = 408



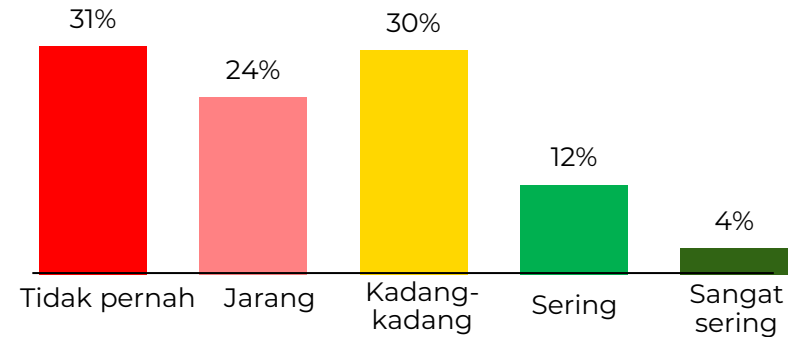
**Mereka yang usia 35-44 lebih banyak menghubungi pejabat terkait (17%), dibandingkan usia 16-24 (1%) dan usia 25-34 (8%)**

## Tingkat aktivisme (3)

Mayoritas masyarakat (55%) tidak pernah atau jarang mengikuti acara-acara pertemuan warga yang membahas isu lokal di daerahnya. Hanya sebagian kecil masyarakat yang sering (12%) atau sangat sering (4%) mengikuti acara pertemuan warga yang membahas isu lokal.

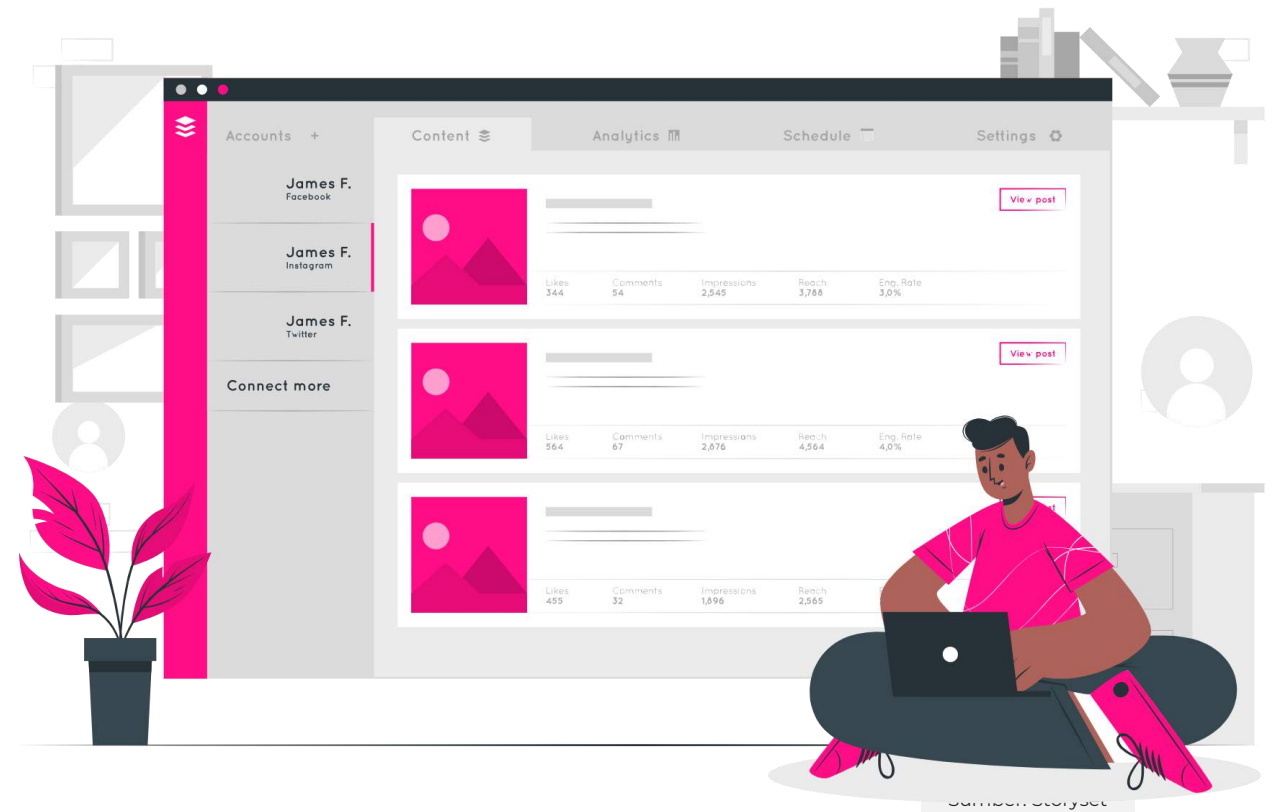
### Frekuensi Menghadiri Diskusi Isu dengan Warga Lain

base: semua, n = 408





# Lampiran



Sumber: Storyset

# Kinerja Pemerintah: Topik Prioritas

Kawula<sup>17</sup>



Isu Lingkungan	Sangat buruk	Buruk	Cukup	Bagus	Sangat bagus
Bencana alam	3%	12%	57%	16%	13%
Hak Asasi Manusia (HAM)	17%	25%	46%	11%	2%
Infrastruktur	12%	18%	44%	15%	11%
Keamanan/ kriminalitas	18%	37%	34%	12%	0%
Kebudayaan	0%	17%	69%	14%	0%
Kepemudaan	21%	11%	39%	18%	12%
Kesehatan	5%	21%	45%	27%	2%
Kesejahteraan	10%	35%	40%	13%	2%
Lingkungan	10%	17%	52%	21%	0%
Pangan	7%	19%	48%	24%	2%
Pariwisata	15%	3%	45%	24%	13%
Pertanian	6%	43%	25%	14%	12%

# Kinerja Pemerintah: Lingkungan

Kawula<sup>17</sup>



Topik Utama	Sangat buruk	Buruk	Cukup	Bagus	Sangat bagus
Banjir	15%	39%	39%	6%	0%
Erosi tanah	12%	37%	42%	7%	2%
Kebakaran hutan	12%	36%	33%	19%	0%
Kenaikan permukaan air laut	3%	27%	52%	11%	7%
Kerusakan terumbu karang	7%	32%	43%	14%	3%
Pemanasan global	16%	28%	46%	9%	2%
Pembuangan limbah industri	17%	40%	33%	11%	0%
Pencemaran sungai	20%	50%	22%	5%	3%
Penebangan hutan	24%	48%	21%	5%	2%
Pengelolaan sampah plastik	13%	39%	37%	8%	2%
Perubahan iklim/cuaca ekstrim	8%	25%	50%	13%	4%
Polusi udara	22%	40%	28%	9%	2%

# Kinerja Pemerintah: Permasalahan Umum

Kawula<sup>17</sup>



Permasalahan	Sangat buruk	Buruk	Cukup	Bagus	Sangat bagus
Adanya peran ganda/ dwifungsi ABRI	21%	30%	50%	0%	0%
Banyaknya pungutan liar di pemerintahan	36%	41%	19%	1%	3%
Hak untuk berkumpul/ berorganisasi	7%	23%	49%	15%	6%
Kebebasan berpendapat	17%	31%	50%	2%	1%
Kemacetan	14%	35%	38%	10%	2%
Konflik lahan antara masyarakat adat dan pemerintah	24%	31%	27%	15%	4%
Kualitas pendidikan/ sekolah tidak merata	9%	38%	43%	8%	3%
Kualitas rumah sakit/ puskesmas tidak merata	12%	31%	45%	12%	1%
Larangan mengkritik pemerintah	34%	33%	25%	8%	0%
Mahalnya harga bahan pokok	23%	39%	33%	5%	0%
Maraknya judi online	54%	26%	17%	4%	1%
Maraknya kekerasan seksual	26%	39%	28%	7%	0%
Penggunaan kekerasan tanpa alasan jelas oleh aparat	31%	34%	27%	6%	2%
Pernikahan dini	12%	33%	34%	12%	9%
Politik dinasti dan nepotisme dalam pemerintahan	54%	23%	14%	6%	4%
Stunting	13%	24%	37%	20%	7%
Transportasi publik tidak memadai	16%	20%	58%	4%	2%

# Sekilas tentang PP17

## Apa itu PP17?

Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami, para peneliti di BOI Research, untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program. Pertama, yaitu **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan per kuartal tentang pemantauan partai dan tokoh politik, dan pandangan terhadap isu untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa melihat pilihan partai berdasarkan isu yang mereka usung. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Kawula<sup>17</sup>



## Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Seperti VAA pada umumnya, beberapa set pertanyaan disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**.

Setelah posisi-posisi partai teridentifikasi, kuesioner disebar melalui **survei online** untuk kalangan publik. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap up to date.



Source: Storyset